

**DIPLOMASI NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI NON STATE ACTORS  
DALAM UPAYA PERDAMAIAN KOFLIK AFGHANISTAN 2018**

**Febby islami abdurahman<sup>1)</sup>, Angga Nurdin Rachmat<sup>2)</sup>, Tholhah<sup>3)</sup>**

1,2,3) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

**Abstrak**

Agama dapat menjadi alat untuk melegitimasi penikaman terhadap manusia, namun di sisi lain ia juga dapat menjadi sumber pengharapan. Agama dalam konflik Afganistan tidak hanya menjadi dasar pembenaran bagi tindakan jihadis, tetapi juga menjadi penyebab terselubung kontlik antar umat beragama di sana yang melahirkan disintegrasi suku dan kelompok agama. Hal ini diperparah dengan tidak adanya institusi struktural yang mengakomodasi persatuan bangsa. Sulitnya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para aktor negara dan organisasi internasional dalam penyelesaian konflik Afghanistan berdampak pada kebutuhan penggunaan second-track diploma untuk membantu penyelesaian revolusi yang tidak pernah berakhir ini. Penunjukan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi masyarakat sipil berbasis agama sebagai mediator oleh Indonesia dalam mendukung upaya rekonsiliasi merupakan titik balik dari upaya transformasi kontlik di Afghanistan. memiliki visi untuk menciptakan perdamaian positif yang bertujuan untuk memitigasi ajaran agama yang berkontribusi dalam konflik dan menghilangkan justifikasi agama sebagai alat untuk melanggengkan kontlik sipil. Dalam konteks diplomasi publik, NU menggunakan mode diplomasi agama yang dapat diartikan sebagai "penggunaan agama untuk berkomunikasi dengan publik global sebagai cara untuk mengatasi konflik Afghanistan. Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana NU menggunakan diplomasi agama dalam transformasi konflik. upaya di Afghanistan.

**Kata Kunci:** konflik Afghanistan; Nahdlatul Ulama; *second-track diplomacy*

**Abstract**

*Religion is two blades which one side can be a tool to legitimize stabbing humans, but on the other hand can be a source of hope. Religion in the Afghanistan conflict is not only a justification for jihadist acts, but also a hidden cause of conflict between religious communities there which gave birth to ethnic and religious group disintegration. This is compounded by the absence of structural institutions that accommodate national unity. The difficulty of*

*reconciliation carried out by state actors and international organizations in the resolution of the Afghanistan conflict has led to the use of second-track diplomacy to help resolve this never-ending revolution. The appointment of Nahdlatul Ulama (NU) which is a religious-based civil society organization as a mediator by Indonesia in supporting reconciliation efforts is the turning point of the conflict transformation effort in Afghanistan. NU has a vision to create positive peace that aims to mitigate religious teachings in contributing to the conflict and eliminate the justification of religion as a tool to perpetuate civil conflict. In the context of public diplomacy, NU uses a model of religious diplomacy that can be defined as "the use of religion to communicate with the global public as a way to overcome the Afghan conflict. This paper seeks to explain how NU uses religious diplomacy in conflict transformation efforts in Afghanistan.*

**Keywords:** Konflik Afghanistan; Nahdlatul Ulama; *second-track diplomacy*

## **PENDAHULUAN**

Hubungan internasional paska perang dingin ditandai dengan berkembangnya aktor dan isu. Di ranah aktor, bermunculan aktor-aktor bukan negara (*non state actors*) yang melakukan berbagai praktek hubungan internasional baik yang mengarah pada kerjasama dan perdamaian maupun ke arah konflik dan pertikaian. Negara tidak lagi menjadi *dominant actor* meski tetap menjadi *primary actor*.

Setelah 9/11 dan jatuhnya rezim Taliban, Islam Afghanistan dengan mudah dikacaukan oleh ekstremisme politik, termasuk teror global al-Qaeda. Munculnya ancaman radikalisme di kalangan anak muda yang disebabkan oleh pendidikan dari mullah (pemimpin masjid yang bertugas dalam menginterpretasikan Islam ke dalam kehidupan sehari-hari) Afghanistan yang berguru ke Pakistan semakin menambah dinamika konflik Afghanistan. Perang sipil antara kelompok Taliban dan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada tingginya angka kematian akibat konflik bersenjata, tetapi juga berimbas pada disintegrasi nasional yang disebabkan oleh renggangnya kohesi sosial antar masyarakat sebagai dampak dari politisasi agama yang berkonfrontasi dengan pemerintah dalam ruang publik. (Borchgrevink, 2007). Sulitnya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para aktor negara dan organisasi internasional dalam penyelesaian konflik Afghanistan berdampak pada kebutuhan penggunaan *second-track diplomacy* bahkan mungkin *Multi Track Diplomacy* untuk membantu penyelesaian revolusi yang tidak pernah

berakhir ini. Dalam hal ini Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turut berinisiatif untuk terjun ke dalam pusaran konflik Afghanistan dengan maksud membawa misi perdamaian. Langkah awal yang dilakukan yaitu menghidupkan kembali kantor kedutaan Indonesia di Afghanistan pada tahun 2008 dengan memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. (Ayu, 2021).

Setelah kurang lebih enam bulan pendirian kantor kedutaan Indonesia di Afghanistan yang penuh dengan aksi kekerasan dan terror misi diplomasi Indonesia di sana mengalami banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini akhirnya Indonesia memilih Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi masyarakat sipil berbasis agama sebagai mediator oleh Indonesia dalam mendukung upaya rekonsiliasi merupakan titik balik dari upaya transformasi konflik di Afghanistan. Kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap NU sangat kuat karena organisasi tersebut mempunyai banyak faktor yang bisa digunakan untuk melakukan pendekatan dengan sangat baik terhadap ulama-ulama di Afghanistan. Dengan kemampuan dan pengalaman yang di miliki NU dalam upaya perdamaian ini adalah tidak hanya melalui terciptanya kesepakatan dan dialog antara pihak pihak berkonflik, tetapi NU juga menganut prinsip ahli sunnah wal jama'ah (ASWAJA) dan prinsip rahmatil lil'alam (menjadi rahmat bagi semesta alam) yang selama ini menjadi karakter tersendiri bagi NU yang tidak dimiliki oleh organisasi islam lainnya yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai contoh nyata dalam membangun masyarakat untuk menjunjung toleransi dan perdamaian. (Ayu, 2021)

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU sendiri kenyataannya tidak bisa bebas dari politik, baik itu nasional maupun internasional. Dalam hal ini, NU sebagai organisasi keagamaan terbesar, membuka ruang komunikasi untuk menjadi peran diplomatik dalam upaya perdamaian ini tentu bukan merupakan suatu hal yang aneh. Karena dalam teori dan prakteknya, ketika misi diplomasi jalur pertama yaitu negara sebagai peran utama mengalami kegagalan, maka seringkali aktor non negara akan turun membantu negara.

Apabila melihat dari penelitian **“Upaya Nahdlatul Ulama dalam Mendukung Rekonsiliasi di Afghanistan pada tahun 2011-2015.”** Karya Adam Ganesa Damasky tersebut menerangkan bahwa Nahdlatul Ulama

berperan aktif sebagai mediator dalam konflik di Afghanistan. banyak upaya-upaya yang telah dilakukan NU diantaranya adalah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik dan juga mendorong/mendukung secara aktif berdirinya Nahdlatul Ulama Afghanistan. Skripsi yang ditulis Damasky menggunakan kerangka pemikiran teori mediasi dan teori organisasi kemasyarakatan untuk dapat menganalisis bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh NU untuk merekonsiliasikan konflik yang terjadi di Afghanistan. salah satu upaya NU adalah ikut membantu dan berperan aktif dalam pendirian Nahdlatul Ulama Afghanistan. Akan tetapi Damasky tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai peran NUA di Afghanistan. Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk menjelaskan peran NUA, organisasi ulama Afghanistan yang berdiri setelah komunikasi panjang NU dengan ulama-ulama Afghanistan, terhadap proses perdamaian Afghanistan menggunakan kerangka pemikiran aktor non-negara dan resolusi konflik. (Damasky A. G., 2016)

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Konstruktivisme**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivisme untuk memandang aktor yang terlibat didalam topik pada penelitian ini. Konstruktivisme sendiri megulas bagaimana aktor yang dikonstruksi secara sosial. Dengan adanya interaksi sosial menyebabkan adanya kesamaan ide, dari ide tersebut tercipta framing yang memberi dampak pada tindakan aktor disekitarnya. Konstruktivisme juga berpendapat bahwa struktur dapat mempengaruhi tindakan aktor sosial dan politik, konstruktivisme memandang ideational structure sama pentingnya dengan *material structure*. (Wendt, 1999). Alexander Wendt pun mengatakan bahwa pentingnya sumber material dipengaruhi oleh makna atau idea yang disepakati oleh manusia dalam sistem sosial.

Konstruktivisme juga berasumsi bahwa *non-material structure* seperti identitas merupakan hal yang penting karena dengan identitas tersebut bisa menentukan sebuah aktor, bagaimana aktor tersebut bertindak dan bagaimana bentuk interest dari aktor tersebut. Oleh karena itu konstruktivis fokus pada identitas sosial, individu, maupun negara, karena identitas

merupakan basis dari terwujudnya interest setiap aktor. (Wendt, 1999). Hadirnya agen dan stuktur dalam konstruktivisme pun dibentuk bersama oleh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu konstruk sosial. Struktur tersebut dapat terbentuk karena adanya knowledge hasil interaksi antar aktor, maka itulah sangat penting bagi konstruktivis untuk dapat membentuk serta merubah sebuah struktur dengan adanya penerapan nilai asumsi konstruktivisme.

### **Konsep Multi Track Diplomacy**

*Multi Track Diplomacy* adalah cara konseptual untuk memandang proses penciptaan perdamaian internasional sebagai suatu sistem yang hidup. Pendekatan ini melihat jaringan aktivitas, individu, institusi, dan komunitas yang saling berhubungan dan beroperasi bersama demi tujuan bersama: dunia yang damai. (Diamond Louise and Mc.Donald, 1996)

Sistem *multi track* ini muncul karena ketidakefisienan mediasi pemerintah murni. Selain itu, peningkatan konflik intrastate (konflik dalam suatu negara) pada tahun 1990-an menegaskan bahwa “Diplomasi Jalur Satu” bukanlah metode yang efektif untuk mengamankan kerja sama internasional atau menyelesaikan konflik. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih interpersonal selain mediasi pemerintah. Oleh karena itu, mantan diplomat Joseph Montville menciptakan “Diplomasi Jalur Dua” untuk melibatkan warga negara dengan keberagaman dan keterampilan dalam proses mediasi. (Diamond Louise and Mc.Donald, 1996)

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Zuriah, 2006). Penelitian dengan metode ini dapat dianalisis dalam berbagai format, di antaranya adalah berupa kajian peluang yang ditawarkan oleh riset observasi, wawancara, riset sumber dokumen dan riset media. Peneliti memilih metode ini karena penelitian kualitatif menyediakan ruang penyelidikan bagi topik yang belum penulis pahami, sehingga dari penyelidikan tersebut kemudian menghasilkan gambaran berdasarkan data-data atau informasi yang dikumpulkan.

Selain itu juga tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah melalui pendekatan institusi agama, peneliti ingin melihat alasan dan peran entitas-entitas keislaman dalam diplomasinya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang motivasi dan kontribusi NU sebagai organisasi Islam dalam diplomasi melalui forum konferensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan dari rekaman pidato tokoh kunci seperti KH Hasyim Muzadi dan KH Said Aqil Siraj. Selanjutnya, untuk memperoleh data sekunder, penulis menggunakan sumber data berupa dokumen dan publikasi resmi terutama tentang konteks dan konten diplomasi NU.

Adapun Untuk menganalisis peran NU dalam proses perdamaian di Afghanistan, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka. Teknik Pengumpulan data adalah sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2014). Dari beberapa teknik riset yang ditawarkan oleh penelitian kualitatif, penelitian ini tidak mendapatkan data yang bersumber dari teknik observasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi penulis untuk melakukan teknik tersebut. Sebab observasi mengharuskan peneliti untuk terjun dan mengamati secara langsung objek penelitian baik secara partisipatif maupun non-partisipatif.

## **PEMBAHASAN**

Negara sebagai *first track diplomacy* dan NU sebagai *second track diplomacy* telah menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. NU merasa diuntungkan karena diberi akses oleh negara sementara Republik Indonesia juga diuntungkan karena citra moderasi Islam Nusantara sebagai identitas nasional dikenal oleh mayoritas internasional. Relasi yang terbentuk di antara kedua entitas ini melahirkan aksi-aksi yang membawa norma-norma agama dalam prosesnya.

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah *multi-track diplomacy* yang akan terfokus pada kedua dan ke tujuh dari sembilan jalur-

yaitu, *Second track diplomacy* dan *faith-based- diplomacy* (agama). Penelitian ini menjadi penting karena beberapa hal: Pertama, agama dalam tradisi hubungan internasional terdahulu masih dipandang sebagai suatu yang rigid, didominasi oleh empat variabel: karakter pemimpin, identitas negara, kepentingan nasional material, dan desakan kelompok Islam. Sedangkan peran agama sebagai ideasonal berupa norma atau nilai acap kali terabaikan dalam hubungan internasional. Kedua, posisi NU sebagai partner pemerintah dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya berpartisipasi sebagai kontributor, namun juga terlibat dalam implementasi kebijakan.

### ***Second Track Diplomacy***

Dalam upaya diplomasi yang dilakukan sebelumnya oleh Indonesia dalam mendukung perdamaian Afghanistan Indonesia juga melibatkan aktor non pemerintah dalam hal ini Organisasi Islam Nahdatul Ulama Indonesia yang merupakan representasi dari *second track diplomacy* ini. Pelibatan NU dapat menunjukkan jalan alternative dan improvisasi dalam pemecahan masalah yang mungkin tidak terjaungkau oleh pemerintah, dalam hal ini menjalin komunikasi oleh ulama Afghanistan dan Ulama Taliban. Dalam second track diplomasi ini bertujuan untuk mengadakan kegiatan postif apapun dengan tujuan perdamaian.

Keterlibatan NU dalam proses perdamaian Afghanistan bermula pada 2010, pemerintah Indonesia dengan komitmennya untuk terlibat dalam proses perdamaian setelah mundurnya NATO dari Afghanistan. Indonesia menggandeng NU bukan tanpa alasan. Dikarenakan NU memiliki *track record* yang baik terhadap komunikasi dengan berbagai elemen di Afghanistan. Hal ini terlihat dengan kesuksesan NU dalam membebaskan Sandra dari Korea Selatan yang ditahan Taliban, Komunikasi yang Intens antara NU dan pemerintah Afghanistan dan pihak yang berkonflik, hingga pada puncaknya dengan terbentuknya Nahdatul Ulama Afghanistan (NUA). Dari pengalaman ini membuat Indonesia melibatkan NU dalam proses perdamaian di Afghanistan.

Keterlibatan NU dalam misi perdamaian dan perannya menunjukkan NU dapat membantu pemerintah Indonesia dalam perdamaian di Afghanistan. Hal ini juga terlihat dengan NU mampu menjangkau bagian diplomasi yang

tidak bisa di capai oleh pihak manapun, termasuk negara ataupun organisasi internasional lainnya. Kekuatan ini lah yang terletak pada posisi NU sebagai aktor *second track* . Sehingga, NU sama sekali tidak terikat oleh berbagai kepentingan apapun. Dan oleh sebab itu, NU mendapatkan kepercayaan dari berbagai elemen yang berada di Afghanistan dengan netralitasnya yang tidak mengejar berbagai kepentingan dalam Konflik Afghanistan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Diamond & Mc. Donald, bahwa dalam multi-track jalur kedua memiliki kelebihan dengan mampu mencari solusi lain dalam melakukan pemecahan suatu masalah yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh pemerintah (*Government*).

### **Pembentukan Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA)**

Terbentuknya Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) tidak dapat dilepaskan dari rentetan-rentetan peristiwa yang berhubungan dengan pihak Republik Indonesia, khususnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diminta langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul sebagai perwakilan Indonesia dalam proses dialog dengan beberapa ulama Afghanistan. (Damasky A. G., 2016)

Tepat pada 5 Mei 2014 bertempat di Kantor NECDO, Kabul, pada jam 09.00 – 14.30 waktu setempat diadakan pertemuan lanjutan yang membahas pendirian Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA). Dengan dihadiri 20 orang peserta yang berasal dari provinsi Kota Kabul, Provinsi Pansjir, Provinsi Maidan Wardak, Provinsi Parwan, dan Provinsi Jalalabad.

Pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang secara resmi telah menandakan pendirian atau pembentukan NUA. Poin-poin tersebut diantaranya adalah;

1. Membentuk Nahdlatul Ulama Afghanistan yang disingkat dengan NUA, dengan merujuk pada Nahdlatul Ulama Indonesia dengan menerapkan lima prinsip Tawasuth, Tasamuh, Tawazun, Adalah, dan Musyarokah.
2. Nahdlatul Ulama Afghanistan adalah organisasi yang bergerak dalam terlibat dalam politik praktis.
3. Organisasi inimerujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari PBNU yang ada di Indonesia.
4. Forum menyepakati bahwa Nahdlatul Ulama Afghanistan akan segera didaftarkan di Kementerian Kehakiman.



5. Menyepakati bentuk lambang Nahdlatul Ulama Afghanistan,
6. Untuk memudahkan komunikasi dengan jamaah dan dengan pengurus yang ada di seluruh Afghanistan, maka dibangunlah stasiun radio dengan jaringan nasional, sekaligus media dakwah.

Pada 09 November 2014 NU Afghanistan secara resmi melaksanakan kegiatan pertamanya yang dihadiri oleh pengurus lengkap NUA. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Star Kabul bekerjasama dengan Karama Network of Advocacy and Human Rights (KNAHR). Selain dihadiri oleh pengurus lengkap kegiatan tersebut juga dihadiri oleh, Advokat, dan Pengacara. Bahkan juga dihadiri oleh hakim dari Mahkamah Agung dan Profesor Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kabul. Selain itu NUA juga menyelenggarakan berbagai lokakarya berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik masalah keamanan, pendidikan, keagamaan, perkembangan politik Islam, dan lain sebagainya. Lokakarya yang dilakukan oleh NUA juga mengundang pihak dari insititusi lain bahkan beberapa kali dari Indonesia.

Terbentuknya organisasi NUA sebagai sebuah wadah pemersatu ulama, menjadi harapan baru bagi proses perdamaian di Afghanistan. Sebelumnya, para ulama dari berbagai daerah, bergerak secara terpisah dan terpecah-pecah dalam faksi-faksi politik, etnis, dan mazhab tertentu. Di dalam NUA, mereka semua dapat bersatu bekerjasama membangun perdamaian. Sebab konsep pembentukan NUA adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di bidang sosial, dengan tanpa afiliasi politik apapun dan ikatan dengan negara manapun. Sehingga mampu menaungi semua ulama dan masyarakat tanpa memandang ideologi, etnis, dan segala macam perbedaan.

Sesuai dengan poin ke-2 pada 5 Mei 2014 joint statement pendirian NUA menjelaskan bahwa NUA adalah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan serta melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam politik praktis. Sudah jelas bahwa dalam hal ini NUA dapat digolongkan sebagai aktor non-negara (*non-state actors*). Sejak pendirian NUA, para anggotanya telah ikut serta berperan aktif dalam pola hubungan internasional, baik itu dengan pola kekuatan masyarakat, ataupun resolusi konflik. Pola kekuatan masyarakat yang dimaksud adalah NUA

beranggotakan para ulama yang dianggap masih memiliki pengaruh di kalangan masyarakat dari berbagai faksi. Dari hal tersebut pendirian ulama Afghanistan ini diharapkan ketika ulama dipersatukan dalam suatu gerakan yang berorientasi ke perdamaian Afghanistan, diharapkan masyarakatnya pun akan mengikuti jejak langkah ulama yakni meredam konflik dan menciptakan perdamaian.

Dalam melaksanakan program kerjanya, NUA sebagai *non state actors* juga seringkali menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau aktor non-negara lain, dalam hal ini NUA melakukan kerjasama dengan Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Cooperation for Peace and Unity (CPAU), Karama Network of Advocacy and Human Rights (KNAHR), bahkan NUA juga sering bekerjasama dengan lembaga pemerintahan baik di Afghanistan seperti Kementerian Haji dan Wakaf Afghanistan, ataupun dengan lembaga pemerintahan negara lain seperti dengan Kementerian Agama Turki.

Selain itu juga, NUA juga telah banyak berpartisipasi dan ikut andil dalam berbagai konferensi baik nasional maupun internasional, seperti Konferensi Nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada Oktober 2015, Konferensi Peran Ulama dalam Perdamaian Berkelanjutan yang dihadiri pula oleh Dubes Uni Emirat Arab (UEA), Dubes Indonesia, NECDO, dan KNAHR pada September 2016, Konferensi bertajuk *New Trends in the Islamic World Religious Heritage and Modernity* di Islamic Academy of Bulgaria pada Desember 2018, dan beberapa konferensi lainnya.

#### **AWPFO (Afghanistan Women's Peace and Freedom Organization) 2015.**

Setelah dialog pada tahun 2014, NUA juga mengeluarkan release dalam forum lanjutan dimana dibahas juga terkait arah dan program NUA sebagai organisasi sosial masyarakat NUA juga fokus kepada perjuangan "penghapusan kekerasan terhadap perempuan", forum dialog yang berlangsung pada 9 November 2014 tersebut NU dan NUA bekerjasama dengan KNAHR (Karama Network of Advocacy and Human Rights) perkumpulan advokat dan pengacara tersebut memang berfokus dalam isu kemajuan gerakan perempuan Islam, dihadirkan juga Hakim dari Mahkamah Agung setempat dan melibatkan profesor dari Fakultas Hukum Universitas Kabul. (Damasky D. M., 2018).

Tahun 2015 berdiri Organisasi Perdamaian dan Kebebasan Wanita Afghanistan (AWPFO) menjadi bagian dari Liga Internasional Wanita untuk Perdamaian dan Kebebasan (WILPF), bersama dengan sekitar 10.000 sukarelawan, bekerja untuk menciptakan Afghanistan yang damai dan sejahtera, bebas dari perang dan kekerasan, dengan dukungan sosial. Keadilan dan kebebasan bagi semua orang. AWPFO mengadvokasi hak asasi manusia, menyatukan perempuan pembawa damai di Afghanistan dan menghubungkan mereka dengan pembawa damai di seluruh dunia melalui inisiatif multidimensi. Ini juga mendukung kesehatan mental, mata pencaharian dan keamanan bisnis milik perempuan dan pembela hak-hak perempuan sejak Taliban merebut kekuasaan.

AWPFO dalam kerjasamanya dengan NUA fokus menolak segala macam diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan, membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan NUA, organisasi AWPFO selalu dilibatkan dalam berbagai forum dan kegiatan NUA yang bekerjasama dengan NECDO, dilansir dari akun resmi Facebooknya bahwa forum NUA dan AWPFO adalah Resolusi Konferensi terkait pembukaan kembali sekolah anak perempuan yang merujuk kepada Al-Quran Surat Az Zumar : 9, Konferensi ilmuwan pria dan wanita yang melibatkan masyarakat sipil, dan giat-giat keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad. Dalam hal ini peran perempuan selalu dilibatkan dalam upaya perdamaian di Afghanistan.

### **Transformasi Dialog lanjutan Nahdlatul 'Ulama dan Taliban di Jakarta periode 2018-2019.**

Pertemuan lanjutan yang dilaksanakan NU dan NUA bersama Taliban sebelumnya dipersiapkan dengan matang, PBNU juga menugaskan seorang pemuda Afghanistan bernama Daud untuk membantu forum dialog lanjutan sebagai penerjemah, Daud juga diminta PBNU untuk menerjemahkan UUD 1945, Pancasila, dan Dasasila Bandung. PBNU akan mengenalkan kepada Taliban bagaimana Indonesia dalam menghadapi problem sosial masyarakatnya serta posisi Indonesia dalam masalah kenegaraan, dimana

hal tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut. Setelah NU Indonesia dibantu NUA melakukan pemetaan masalah di Afghanistan.

Dr. Fazal Ghani Kakar mewakili NUA membantu NU Indonesia menentukan tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam forum dialog lanjutan dengan Taliban upaya ini dilakukan demi menentukan langkah-langkah yang akan dihadapi baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Dr. Fazal Ghani Kakar secara langsung melakukan pendekatan dengan pihak Taliban baik faksi Akhunjada maupun Haqqani, pihak Taliban sangat terbuka dengan akan diadakannya forum lanjutan tersebut. Hasilnya memutuskan peserta forum dialog yang akan dilangsungkan di Jakarta 22 September 2018.

Pertemuan yang diselenggarakan pada 22 September 2018 di Jakarta atas prakarsa NU yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan. peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya : Mr. Muhammad Ishaq Safi ( Direktur Radio Syariah Taliban ), Mr. Abdussalam Zaef ( Dubes Taliban di Islamabad ), Mr. Wakil Ahmad Mutawakkili (Mantan Menlu Taliban) Mr. Abdussalam Rocheti ( Komandan Taliban Wilayah Timur ), dan para delegasi yang dipimpin oleh ketua NUA Dr. Abdul Ghani Kakar. Adapun dari pihak NU yang turut hadir yakni :KH. As'ad Said Al ( mantan Wakil Ketum PBNU ), Letjend TNI (Purn) Nono Sampono ( DPD RI ), Ichsan Malik ( Coordinator Peace Psychology Programme of University of Indonesia ), Andul Mun'im DZ ( Wasekjend PBNU ), KH.Ubaidillah Shodaqoh ( Rois Syuriah PWNU Jateng), ), KH.Mayuri Malik ( Mantan Ketua Laziznu PBNU), dan Letjend TNI(Purn) Anshori Tajudin( Mantan Dubes Afghanistan). dialog ini merupakan langkah penting dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 42 Tahun.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai delegasi menyampaikan pemikiran mereka melalui dialog yang dipimpin Dr. As'ad. Perwakilan Indonesia memulai diskusi dengan menyampaikan apresiasi dan sambutan atas kehadiran para pemimpin Taliban, serta memberikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai konflik, serta bagaimana Indonesia bisa berhasil dalam membangun negara yang damai ditengah keberagaman di Indonesia. Kemudian kepala delegasi Taliban, Mr. Wakil Ahmad Mutawakkil memberikan sambutannya dengan menyampaikan “ Kami senang bisa hadir

dan menyaksikan Indonesia sebagai negara yang damai dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Yang bersatu, dimana dari persatuan tersebut dibentuk melalui musyawarah dengan beranekaragam suku, budaya, dan agamanya.

Dalam forum diskusi, Taliban diwakili oleh Abdul Salam Zaeif Noor menyampaikan kepada forum NU – Ulama Afghanistan, bahwa posisi Indonesia dalam konflik Afghanistan ini netral, perang di Afghanistan bukan perang agama, melainkan perang politik, Afghanistan menjadi rebutan karena Afghanistan memiliki posisi geopolitik yang strategis, bahwa hingga saat ini baik pemerintah Afghanistan maupun pihak Taliban belum memiliki konsep yang jelas dalam forum ini, harus memahami situasi di Afghanistan, agar tim perdamaian bisa melangkah dengan cermat, merumuskan prinsip-prinsip perdamaian yang sistematis dan menyeluruh, agar kami semua bisa mengambil langkah lanjutan utamanya isu pendidikan dan kesehatan, untuk memudahkan masuk ke wilayah pendudukan Taliban.

Selain menyampaikan dukungan, terdapat beberapa poin pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Salam Zaeif kepada NU mewakili kelompoknya, yaitu:

1. Menekankan pentingnya netralitas yang dimiliki NU maupun pemerintah Indonesia agar diterima dan dipercaya penuh oleh baik pemerintah Afghanistan maupun Taliban.
2. Perang di Afghanistan bukan merupakan perang agama, melainkan perang politik. Karena itu, upaya yang dilakukan juga harus menjangkau jalur politik. Sebab kekacauan yang terjadi tidak lepas dari perebutan kepentingan geopolitik Afghanistan yang strategis.
3. Pentingnya membentuk konsep yang jelas dalam mengupayakan perdamaian. Sebab baik pemerintah maupun Taliban belum memiliki konsep dan strategi yang jelas. Diharapkan dalam prakarsa NU ini konsep dan strategi perdamaian dapat terbentuk dengan baik.
4. Agar Indonesia (pemerintah maupun NU) selalu melangkah dengan hati-hati, sebab perang di Afghanistan melibatkan banyak kekuatan besar dan kuat. Serta harus memiliki informasi yang lengkap tentang situasi di Afghanistan agar upaya ini dapat berjalan dengan lancar.

5. Forum dialog ini diharapkan dapat merumuskan prinsip-prinsip perdamaian yang sistematis dan menyeluruh agar bisa dikembangkan oleh Taliban. Apalagi jika dapat menjangkau masuk ke dalam isu pendidikan dan kesehatan, karena isu tersebut dapat dengan mudah diterima di wilayah pendudukan Taliban.
6. Agar melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah Afghanistan, Taliban, dan juga kekuatan asing agar upaya prakarsa perdamaian ini dapat mencapai keberhasilan. Selain itu, juga harus mendorong negara lain yang sebelumnya tidak mempunyai kepedulian terhadap Afghanistan, agar mau bekerjasama terlibat dan mendukung proses perdamaian.
7. Tidak kalah pentingnya yaitu melibatkan kepala suku, komandan perang, tokoh masyarakat, media massa, kalangan saudagar, kalangan akademisi, dan lain sebagainya. Sehingga spektrum perdamaian yang telah dibangun ini dapat menyebar dengan luas dan menjadi lebih kokoh.

## **KESIMPULAN**

Upaya Nahdlatul Ulama dalam mendorong perdamaian di Afghanistan periode 2018-2020 terlihat dalam proses diplomasi Multi Track yang dilakukan oleh Indonesia. First Track Diplomacy dan Second Track Diplomacy yang dilakukan oleh NU sendiri memberikan hasil yang positif dalam mendorong perdamaian di Afghanistan. keberhasilan tersebut dapat dilihat dalam empat aspek yakni, upaya memperoleh kepercayaan bagi kedua pihak yang berkonflik, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, Peran Ulama, dan dukungan internasional.

Diplomasi agama yang dilakukan oleh PBNU dalam upaya perdamaian di transformasi konflik berada pada tiga aspek, yaitu advokasi, dialog, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, diplomasi ini terus dikembangkan dengan memfokuskan pada upaya rekonsiliasi antara kelompok Taliban dan Non Taliban disamping juga mengusahakan terbentuknya perdamaian melalui upaya dialog keagamaan dan pembentukan organisasi masyarakat yang memiliki nilai-nilai aswaja sebagaimana yang dimiliki oleh NU. Kehadiran ulama atau aktor keagamaan menegaskan bahwa kreativitas diplomasi perlu digunakan untuk membantu penyelesaian konflik dari jalur-

jalur yang lebih fleksibel dengan visi untuk mendukung usaha perdamaian dari jalur diplomasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah. Belum ada laporan penelitian yang mengevaluasi keberhasilan NU dalam transformasi konflik Afghanistan secara direktif. Untuk itu, ini perlu menjadi upaya bersama ke depan agar dapat membuktikan seberapa jauh efektivitas diplomasi agama yang dilakukan oleh NU di Afghanistan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, R. (2021). Resposisi Agama dalam Perang: Peran Nahdlatul Ulama dalam Usaha Mendukung Transformasi Konflik Afghanistan 2013-2019. *Journal of Integrative International Relations* 6.1 , 17-36.
- Borchgrevink, K. (2007). Religious actors and civil society in post-2001 . Oslo: *International Peace Research Institute*.
- Damasky, A. G. (2016). Upaya Nahdlatul Ulama Mendukung Rekonsiliasi di Afghanistan Pada Tahun 2011-2015.
- Damasky, D. M. (2018). *Diplomasi Jalur kedua: Peran NU Dalam Perdamaian Dalam Perdamaian di Afghanistan*. Depok: Tosemito Press.
- Diamond Louise and Mc.Donald, J. (1996). *Multi Track Diplomacy*. New York: Kumarian Press.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University press.
- Zuriah, N. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.